

# **KONSTRUKSI** **DALAM ANGKA**

PROVINSI JAWA BARAT

# 2017



<https://jaba.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

# ***KONSTRUKSI DALAM ANGKA***

PROVINSI JAWA BARAT

# **2017**





## KONSTRUKSI DALAM ANGKA PROVINSI JAWA BARAT 2017

**No. Publikasi** : 32530.1811  
**Katalog BPS** : 6301005.32  
**Ukuran Buku** : 17,6 cm x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : xiv + 42 halaman

**Naskah** :  
Bidang Statistik Produksi

**Gambar Kulit** :  
Bidang Statistik Produksi

**Ilustrasi Cover** :  
Bangunan Konstruksi

**Diterbitkan Oleh** :  
©BPS Provinsi Jawa Barat

**Dicetak oleh** :  
BPS Provinsi Jawa Barat

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini  
untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat  
Statistik**

## **KONSTRUKSI DALAM ANGKA PROVINSI JAWA BARAT 2017**

### **Tim Penyusun**

Pengarah : Ir. Dody Herlando, M.Econ

Koordinator Teknis : Aryanto, S.Si., M.M

Naskah : Haiban Hajjid Arsyadana, SST

Pengolah Data : Haiban Hajjid Arsyadana, SST

Gambar Kulit dan Infografis : Haiban Hajjid Arsyadana, SST

Penyunting : 1. Ir. Yayah Siti Mariah  
2. Nani Komalasari, SE

## KATA PENGANTAR

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan cukup penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Publikasi “Konstruksi Dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017” ini merupakan edisi keempat yang disusun oleh Seksi Statistik PEK (Pertambangan, Energi dan Konstruksi) Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Publikasi Konstruksi Dalam Angka ini menyajikan data dan informasi hasil Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan sampai tahun 2017 dan Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan sampai tahun 2018 yang meliputi Jumlah Perusahaan menurut Badan Usaha, Ketenagakerjaan, Nilai konstruksi yang diselesaikan, Biaya Antara, Nilai Output, Indeks Prospek Bisnis, Indeks Kondisi Bisnis, Indeks Umum dan Pertumbuhan Pekerja.

Publikasi ini dapat diwujudkan atas kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan dalam pembuatan publikasi ini. Selain itu, kami menerima saran dan kritik untuk membantu perbaikan dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Bandung, Oktober 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Barat



**Ir. Dody Herlando, M.Econ**



# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Grafik .....	xiii
I. Pendahuluan.....	1
II. Penjelasan Teknis .....	3
II.1 Geografi, Pemerintahan, dan Kependudukan .....	3
II.2 Konstruksi.....	7
II.3 Perusahaan.....	7
II.4 Sertifikat .....	7
II.5 Jaringan Perusahaan Konstruksi .....	8
II.6 Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha/Perijinan .....	9
II.7 Status Badan Hukum/Badan Usaha .....	9
II.8 Kategori Konstruksi .....	11

II.9 Kualifikasi Perusahaan.....	12
II.10 Nilai Pekerjaan Konstruksi.....	13
II.11 Hubungan/Keterkaitan Antar Sektor Produksi .....	14
II.12 Jalan Nasional.....	14
II.13 Nilai Indeks Prospek dan Kondisi Bisnis .....	15
II.14 Nilai Indeks Masalah dan Indeks Masalah Bisnis .....	15
II.15 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).....	15
II.16 Indeks Tendensi Bisnis (ITB) .....	16
III. Analisis Singkat .....	17
III.1 Struktur Ekonomi .....	17
III.2 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Konstruksi.....	18
III.3 Nilai Konstruksi yang telah diselesaikan .....	19
III.4 Penyerapan Tenaga Kerja.....	20
III.5 Sebaran Perusahaan Konstruksi di Jawa Barat .....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Banyaknya Wilayah Administrasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	23
Tabel 2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017.....	24
Tabel 3	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun (2010-2017 dan 2016-2017) dan Angkatan Kerja Tahun 2017 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.....	25
Tabel 4	Rumah Tangga dan Rata-rata Rumah Tangga di Jawa Barat Tahun 1990-2017.....	26
Tabel 5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Termasuk Minyak dan Gas Bumi) Tahun 2017.....	27
Tabel 6	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Termasuk Minyak dan Gas Bumi) Tahun 2017.....	28
Tabel 7	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah).....	29
Tabel 8	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah).....	30
Tabel 9	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori 2015-2017 (Dalam Persen).....	31

Tabel	Halaman
Tabel 10 Laju PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori 2015-2017 (Dalam Persen).....	32
Tabel 11 Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk Dan PDRB per Kapita Menurut Kategori 2014-2016 (Dalam Persen).....	33
Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Sektor Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	34
Tabel 13 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 (Dalam Persen).....	35
Tabel 14 Banyaknya Perusahaan/Usaha Konstruksi Menurut Badan Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.....	36
Tabel 15 Banyaknya Perusahaan/Usaha Konstruksi Menurut Skala Usaha di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.....	37
Tabel 16 Nilai Konstruksi yang diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan dan Sumber Dana di Jawa Barat Tahun 2012-2016.....	38
Tabel 17 Jumlah Pekerja di Perusahaan Konstruksi Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.....	39
Tabel 18 Nilai Output, Biaya Antara Perusahaan Konstruksi Tahun 2014-2016.....	40
Tabel 19 Indeks Prospek Bisnis, Indeks Kondisi Bisnis dan Indeks Umum Perusahaan Konstruksi Jawa Barat per Triwulan 2015-2018.....	41
Tabel 20 Pertumbuhan Pekerja Tetap, Pekerja Harian, Balas Jasa dan Nilai Konstruksi Jawa Barat per Triwulan Tahun 2015-2018.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Barat Tahun 2017.....	2
Gambar 2	Banyaknya Perusahaan Konstruksi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, 2017.....	22

<https://jabar.bps.go.id>



## DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 1	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Sektor Usaha 2015-2017 (Dalam Persen).....	17
Grafik 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	18
Grafik 3	Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan dan Sumber Dana di Jawa Barat Tahun 2012-2016 (Dalam Juta Rupiah).....	19
Grafik 4	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Balas Jasa Pekerja Perusahaan Konstruksi di Jawa Barat Tahun 2014-2016.....	21



## I. PENDAHULUAN

Konstruksi Dalam Angka 2017 ini merupakan edisi keempat yang berisi muatan berbagai indikator konstruksi di Provinsi Jawa Barat. Data tersebut sebagian besar merupakan hasil kegiatan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Konstruksi Tahunan (SKTH), *Updating* Perusahaan Konstruksi (UDP) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data lainnya merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait.

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan statistik deskriptif yang menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data sektor konstruksi bagi konsumen data.

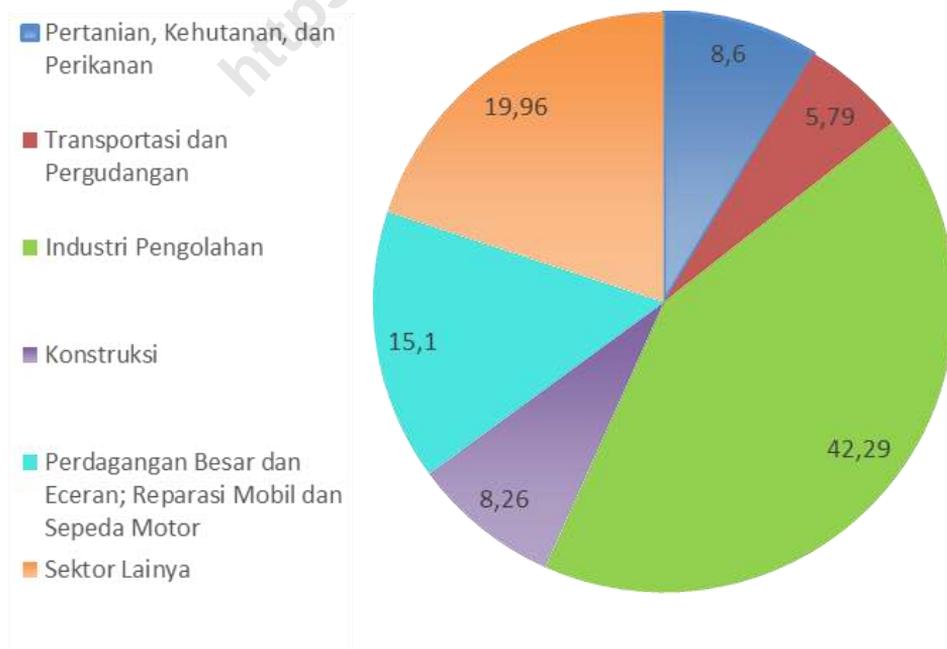
Sektor Konstruksi merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan cukup besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor konstruksi tidak bisa dipungkiri memiliki peran strategis pada pembangunan wilayah di setiap daerah di Jawa Barat. Peran strategis tersebut diantaranya adalah pada penyerapan tenaga kerja. Dari sisi lapangan kerja, peranan sektor konstruksi mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Hal ini karena jumlah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Jawa Barat cukup besar yaitu sekitar 21.459 perusahaan pada tahun 2016. Selain itu dengan adanya proyek-proyek infrastruktur akan menyerap pekerja harian lepas dalam jumlah cukup besar sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Sektor konstruksi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Kondisi ekonomi nasional ditentukan oleh

besarnya kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan sektor usaha lainnya. Sektor konstruksi akan mendukung pembangunan infrastruktur, sarana prasarana sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai contoh pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan niaga, prasarana sanitasi, kesehatan dan pendidikan serta fungsi – fungsi sosial lainnya juga menjadi lebih baik.

Gencarnya pembangunan infrastruktur di Jawa Barat menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sektor konstruksi terhadap Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Barat yang meningkat sebesar 8,26 persen pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,12 persen. (lihat Gambar 1)

**Gambar 1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Barat Tahun 2017**



## II. PENJELASAN TEKNIS

### II.2 Geografi, Pemerintahan, dan Kependudukan

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak di antara :

- sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta
- sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
- sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten

Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 37.173,97 km<sup>2</sup>.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, sedangkan jumlah Kecamatan 627, yaitu 2.672 daerah Perkotaan dan 3.291 daerah Perdesaan. (*Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017*)

Jumlah Penduduk Jawa Barat pada Tahun 2017 sebanyak 48.037.827 jiwa, sedangkan Jumlah rumah tangga sebanyak 12.761.171 dengan rata-rata per rumah tangga diatas 3 orang. Kepadatan Penduduk di Jawa Barat tahun 2017 sebesar 1.358 orang/km<sup>2</sup>. Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk selama Tahun 2010-2017 adalah 1,54 persen. Pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat berada di Kota Bandung. (*Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017*)

- 1) **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
- 2) **Rata-rata pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

- 3) **Sumber utama data ketenagakerjaan** adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Sejak tahun 2005, Sakernas dilaksanakan pengumpulan datanya pada bulan Februari dan Agustus.
- 4) **Penduduk usia kerja** di definisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah mereka yang tergolong aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi di ukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja dan yang mencari pekerjaan.
- 5) **Kesempatan kerja** memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, tenaga kerja yang tidak terserap dikategorikan sebagai penganggur. Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat sebanyak 22.391.003 orang. Yang aktif bekerja sebanyak 20.551.575 orang atau sebesar 91.78 persen dan yang menganggur sebanyak 8.22 persen. (*Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017*)
- 6) **Proporsi pekerja** menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal lain dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.
- 7) **Bekerja** adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh dan membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

- 8) **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.
- 9) **Perusahaan** adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak disuatu bangunan fisik pada lokasi tersendiri. Badan perusahaan konstruksi dapat berbentuk PT, CV, Firma, PT (Persero).
- 10) **Pekerja** adalah semua orang yang pada saat pencacahan bekerja di perusahaan, baik pekerja tehnik maupun pekerja non tehnik.
- 11) **Pekerja tetap** adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan usaha yang menerima upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut.
- 12) **Balas Jasa pekerja** adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang tersebut.
- 13) **Nilai pemakaian bahan bangunan yang disediakan pemilik pekerjaan** adalah seluruh nilai bahan bangunan yang dipakai untuk setiap proyek selama tahun 2015 yang disediakan pemilik dan dicatat pada pendapatan perusahaan.
- 14) **Nilai dari pendapatan lainnya** adalah pendapat yang diperoleh selain dari pendapatan utama usaha konstruksi, seperti: jasa desain gambar, konsultan, penggunaan modal jasa konstruksi, sewa tanah, sewa bangunan, sewa peralatan konstruksi, dan kegiatan lainnya.

- 15) **Pengeluaran usaha** adalah seluruh jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/pengusaha. Pengeluaran dibedakan menurut biaya khusus dan biaya umum.
- 16) **Hari orang pekerja harian** adalah jumlah pekerja harian dalam satu hari untuk menyelesaikan satu pekerjaan.
- 17) **Balas jasa dan upah** adalah seluruh pengeluaran yang dibayarkan kepada pekerja tetap dan pekerja harian berupa upah gaji, upah lembur, hadiah, bonus, dana pensiun, tunjangan kecelakaan dan pengeluaran lainnya yang dibayarkan dalam bentuk upah maupun barang sebagai balas jasa dan upah.

## **II.2 Konstruksi**

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan.

## **II.3 Perusahaan**

Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di bangunan fisik pada lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk PT (Persero), NV/PT, CV, Firma, Koperasi dan lainnya.

## **II.4 Sertifikat**

Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai perwujudan hasil registrasi, baik yang berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha.

## II.5 Jaringan Perusahaan Konstruksi

### a. Tunggal

Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain dari perusahaan tunggal adalah perusahaan tanpa cabang.

### b. Kantor Pusat/induk

- i. Kantor pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu (divisi).
- ii. Cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.
- iii. Perwakilan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari unit kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.
- iv. Unit pembantu (divisi) adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam kegiatannya membantu keperluan unit kegiatan ekonomi yang berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang maupun perwakilan. Unit pembantu (divisi) pada umumnya tidak mempunyai kewenangan.

## II.6 Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha/Perijinan

Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha/Perijinan diantaranya adalah sebagai berikut :

- i. **Badan Hukum** adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.
- ii. **Badan Usaha** adalah Kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
- iii. **Badan usaha yang disebut Badan Hukum** : Usaha yang modalnya dipisahkan, seperti : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.
- iv. **Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum** : Usaha yang modalnya tidak dipisah, seperti : CV, Fa (Firma) dan Perorangan.

## II.7 Status Badan Hukum/Badan Usaha

### A. Badan usaha yang disebut Badan Hukum

Badan usaha yang disebut Badan Hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. **Perseroan Terbatas (PT)** : Perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai minimal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemenang saham ikut serta berperan tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.
- ii. **Koperasi** : Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.

- iii. **Yayasan** : Suatu badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititik beratkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.

## **B. Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum**

Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

- i. **Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV)** : Perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah yang bertanggung jawab memberikan modal (uang) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modal saja.
- ii. **Firma** : Perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang terdiri yang masing-masing merupakan sekutu aktif. Para sekutu harus menyerahkan kekayaannya sesuai yang tertera di akta pendirian.
- iii. **Perseorangan** : Suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan ataupun lebih tanpa bentuk badan hukum/usaha.
- iv. **Ijin Khusus dari Instansi terkait** : Ijin yang dikeluarkan oleh departemen/instansi yang membina, baik dinas tingkat provinsi maupun dinas tingkat kabupaten/kota kepada perusahaan/usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- v. **Lainnya** : adalah semua bentuk badan hukum perusahaan yang belum termasuk pada uraian di atas.

## **II.8 Kategori Konstruksi diberi kode F yang terdiri dari :**

### **a. Konstruksi Gedung (KBLI 2015, 41)**

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau seluruhnya.

### **b. Konstruksi Bangunan Sipil (KBLI 2015, 42)**

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.

### **c. Konstruksi Khusus (KBLI 2015, 43)**

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau ketrampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok

ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lainnya, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi.

## **II.9 Kualifikasi Perusahaan**

Kualifikasi Perusahaan adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.

Berdasarkan Peraturan No. 10 Tahun 2014 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN) Penggolongan Kualifikasi ini dapat dibagi atas 5 (lima) jenjang kompetensinya dalam Kode Skala Usaha (dapat dilihat pada Tabel 1).

1. Perorangan
2. Kecil : Kualifikasi K1, K2, K3
3. Menengah : Kualifikasi M1, M2
4. Besar : Kualifikasi B1 , B2
5. Non Kualifikasi

**Tabel 1. Penggolongan Kualifikasi Perusahaan berdasarkan Kode Kualifikasi Perusahaan**

No	Golongan Usaha	Klasifikasi	Batas Nilai Satu Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perorangan	Perorangan	s.d 300 Juta
2	Kecil	K1	s.d 1 Milyar
		K2	s.d 1,75 Milyar
		K3	s.d 2,5 Milyar
3	Menengah	M1	s.d 10 Milyar
		M2	s.d 50 Milyar
4	Besar	B1	s.d 250 Milyar
		B2	Tak Terbatas
5	Non Kualifikasi	Tidak Mendaftar ke LPJKN/Sudah <i>expired</i>	

## II.10 Nilai Pekerjaan Konstruksi

Nilai pekerjaan konstruksi adalah nilai pekerjaan dikurangi nilai pekerjaan yang disubkontrakkan dikalikan persentase realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan dalam kurun waktu tahun berjalan.

**Dampak langsung** sektor adalah suatu besaran yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat perubahan permintaan akhir pada sektor tersebut. Dampak langsung menunjukkan angka yang terjadi terhadap seluruh sektor ekonomi apabila terjadi kenaikan output sebesar 1 (satu) satuan. Contoh : Dampak langsung Bangunan Tempat Tinggal = 0,52 berarti setiap kenaikan output 1 (satu) satuan menimbulkan peningkatan seluruh sektor ekonomi sebesar 0,52.

## II.11 Hubungan / Keterkaitan antar sektor produksi

Hubungan atau Keterkaitan antar sektor produksi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) **Hubungan ke depan (*forward linkage*)** disebut **derajat kepekaan:** yang merupakan hubungan penjualan barang jadi. Derajat kepekaan adalah suatu besaran yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat perubahan permintaan akhir pada masing–masing sektor. Konsep ini sering diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan sektor hilirnya atau daya dorong yang kuat dalam mempengaruhi aktivitas sektor ekonomi lain pada industri hilirnya.
- 2) **Hubungan ke belakang (*backward linkage*)** disebut **daya penyebaran:** yang merupakan hubungan dengan bahan mentah atau bahan baku. Daya penyebaran adalah jumlah dampak seluruh sektor ekonomi karena permintaan akhir terhadap sektor  $i$  berubah satu unit. Konsep ini juga sering diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk meningkatkan pertumbuhan sektor hulunya.

## II.12 Jalan Nasional

Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Jalan ini menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaan jalan nasional berada pada pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum).

### II.13 Nilai Indeks Prospek dan Kondisi Bisnis (ID)

Nilai Indeks Prospek dan Kondisi Bisnis pengusaha akan terletak diantara range 0 - 100 yang diinterpretasikan sebagai berikut:

ID = 100 : Semua pengusaha menyatakan kondisi usahanya meningkat

ID > 50 : Jumlah pengusaha yang menyatakan kondisi usahanya *meningkat* lebih banyak dibandingkan yang menyatakan *menurun*, umumnya pengusaha cenderung *optimis* akan kondisi usahanya

ID < 50 : Jumlah pengusaha yang menyatakan kondisi usahanya *menurun* lebih banyak dibandingkan yang menyatakan *meningkat*, umumnya pengusaha cenderung *pesimis* akan kondisi usahanya

ID = 0 : Semua pengusaha menyatakan kondisi usahanya menurun

### II.14 Nilai Indeks Masalah (IM<sub>v</sub>) dan Indeks Masalah Bisnis (IMB)

Nilai Indeks Masalah dan Indeks Masalah Bisnis akan terletak diantara range 0 - 100, dan diinterpretasikan sebagai berikut :

IM<sub>v</sub> atau IMB = 0 : tidak ada masalah

0 < IM<sub>v</sub> atau IMB ≤ 25 : sedikit masalah

25 < IM<sub>v</sub> atau IMB ≤ 50 : cukup bermasalah

50 < IM<sub>v</sub> atau IMB ≤ 75 : bermasalah

75 < IM<sub>v</sub> atau IMB ≤ 100 : sangat bermasalah

### II.15 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) :

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK rata-rata nasional. Dengan demikian angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang

dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah jenis barang/bahan bangunan dan harga sewa alat-alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar.

- **Upah riil** adalah upah nominal yang telah disesuaikan dengan tingkat biaya hidup yang diukur dengan indeks harga konsumen.
- **Upah nominal** adalah rata-rata upah per bulan yang diterima buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor dalam bentuk uang.

## II.16 Indeks Tendensi Bisnis (ITB)

Indeks Tendensi Bisnis merupakan indeks yang menggambarkan kondisi bisnis dan perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

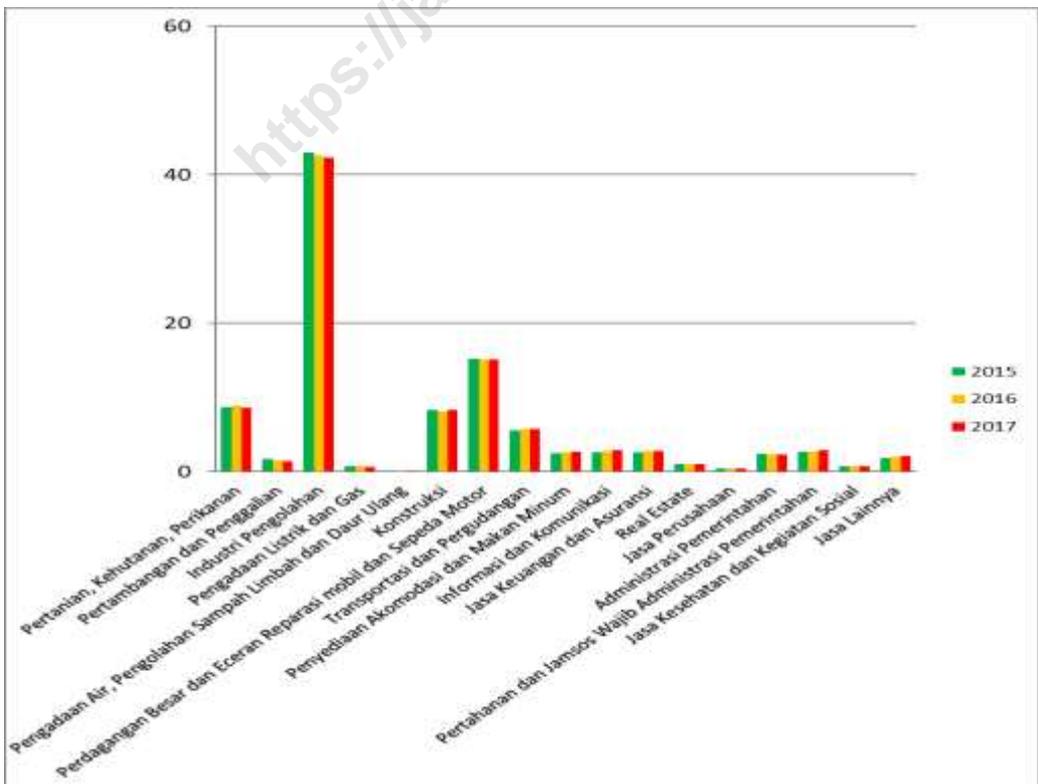
- a. Nilai  $ITB < 100$ , menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- b. Nilai  $ITB = 100$ , menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- c. Nilai  $ITB > 100$ , menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.

### III. ANALISIS SINGKAT

#### III.1 STRUKTUR EKONOMI

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Jawa Barat tidak mengalami pergeseran, dimana sektor tersier memiliki peran yang dominan, terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor usaha terhadap distribusi PDRB di Jawa Barat. Sumbangan terbesar pada tahun 2017, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, Kemudian Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan yang keempat sektor Konstruksi. Sementara peranan sektor lainnya di bawah 8 persen. (lihat Grafik 1)

**Grafik 1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Sektor Usaha 2015-2017 (Dalam Persen)**

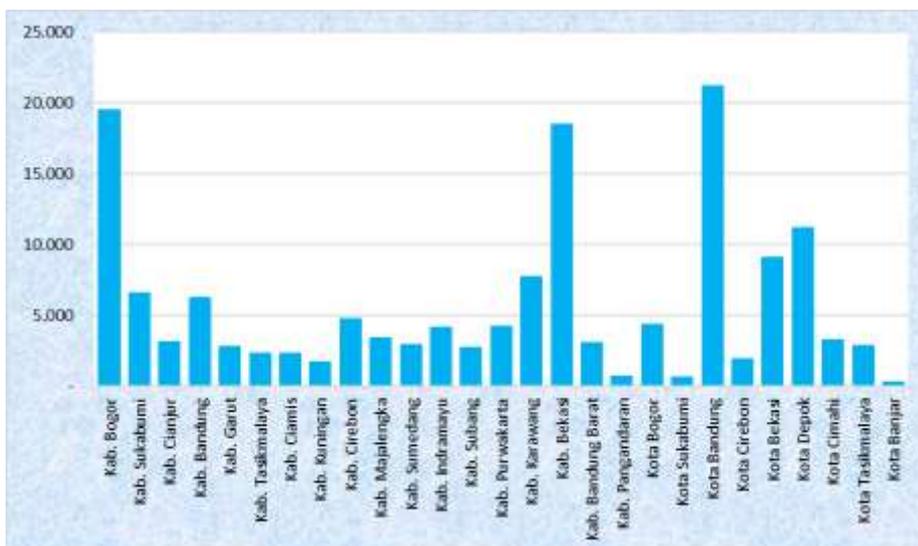


## III.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR KONSTRUKSI

Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor konstruksi pada Tahun 2017 mencapai 147.554.690 juta atau memberikan kontribusi sebesar 8,26 persen terhadap total perekonomian Provinsi Jawa Barat, meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebesar 8,12 persen. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor konstruksi Tahun 2017 sebesar 7,24 persen, meningkat bila dibandingkan pertumbuhan pada Tahun 2016 sebesar 5,02 persen.

Nilai tambah bruto sektor konstruksi terbesar Tahun 2017 berada di Kota Bandung yaitu sebesar 13,87 persen dari total pendapatan, kemudian diikuti Kabupaten Bogor sebesar 12,74 persen dan Kabupaten Bekasi yang juga sebesar 12,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung masih mendominasi sektor konstruksi. Sementara Kabupaten/Kota lainnya memiliki pendapatan bruto sektor konstruksi kurang dari 8 persen.

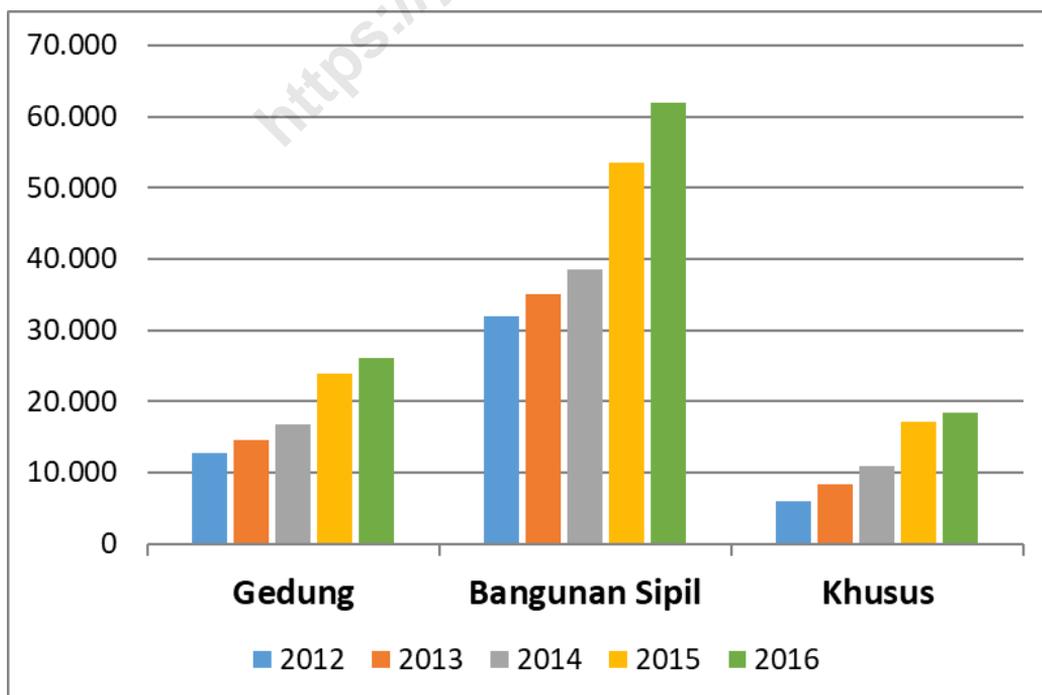
**Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 (Dalam Juta Rupiah)**



### III.4 NILAI KONSTRUKSI YANG TELAH DISELESAIKAN

Besaran nilai konstruksi yang telah diselesaikan setiap tahun konsisten selalu mengalami peningkatan dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan peningkatan nilai konstruksi mencapai 28 triliun. Pekerjaan konstruksi dari tahun ke tahun didominasi oleh pekerjaan bangunan sipil berupa jalan, jembatan, saluran pipa, irigasi, dan lain-lain. Pada tahun 2016 nilai konstruksi pekerjaan bangunan sipil diperkirakan mencapai Rp.61,9 triliun atau sekitar 58,28 persen dari total nilai konstruksi. Selanjutnya pekerjaan konstruksi bangunan gedung berada di urutan kedua sebesar 24,47 persen dan pekerjaan konstruksi bangunan khusus sebesar 17,25 persen.

**Grafik 3. Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan dan Sumber Dana di Jawa Barat Tahun 2012-2016 (Dalam Juta Rupiah)**



### **III.5 PENYERAPAN TENAGA KERJA**

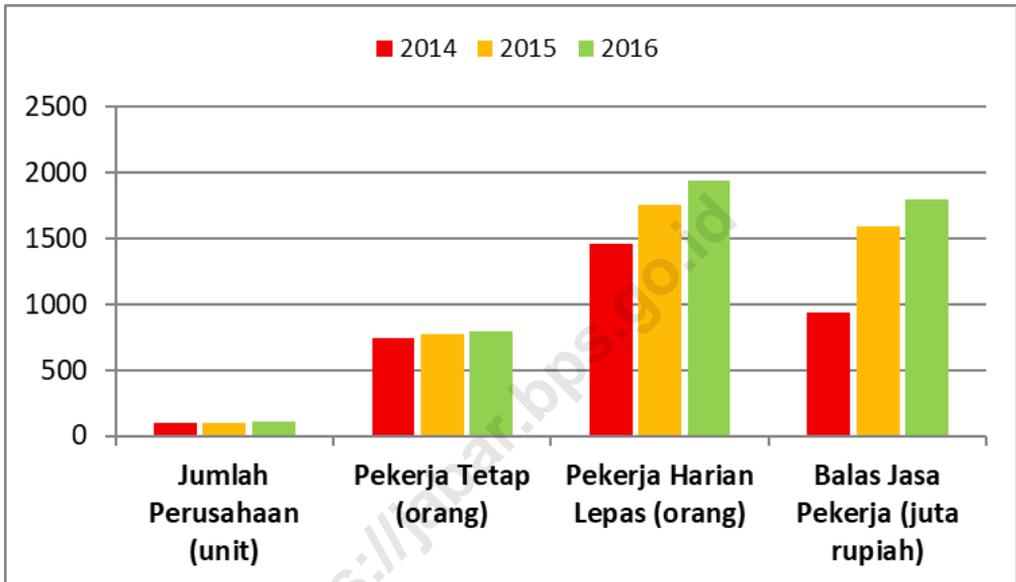
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang harus ada didalam pembangunan ekonomi, tanpa adanya tenaga kerja, suatu perusahaan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja menjadi hal yang strategis dalam pembangunan. Salah satu sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja yaitu sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagai gambaran jumlah pekerja tetap yang diserap pada tahun 2014 di Jawa Barat sebanyak 74.658 pekerja dan terus meningkat menjadi 79.023 pekerja pada tahun 2016.

Disamping tenaga kerja tetap, penyerapan pekerja harian lepas juga berkontribusi sangat besar. Hal ini dikarenakan pengusaha konstruksi lebih memilih menggunakan pekerja kontrak dan sub kontrak dibandingkan pekerja tetap. Sebagai gambaran pada tahun 2016 jumlah pekerja harian lepas yang diserap di perusahaan konstruksi diperkirakan mencapai 99,95 persen dari total penyerapan pekerja. Selain itu jumlah pekerja harian lepas yang diserap dari tahun ke tahun terus meningkat, pada tahun 2014 sekitar 145 juta dan terus meningkat menjadi 193 juta pada tahun 2016.

Selain tenaga kerja, perusahaan juga merupakan salah satu faktor penting dalam membuka lapangan pekerjaan guna penyerapan tenaga kerja. Jumlah perusahaan konstruksi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 konsisten mengalami peningkatan. Seiring meningkatnya jumlah perusahaan

dan tenaga kerja, balas jasa pekerja juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Grafik 4. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Balas Jasa Pekerja Perusahaan Konstruksi di Jawa Barat Tahun 2014 - 2016**



- Jumlah Perusahaan dan Pekerja Tetap (Dalam Ratusan)
- Pekerja Harian Lepas (Dalam Ratus Ribuan)
- Balas Jasa Pekerja (Dalam Puluh Ribuan)

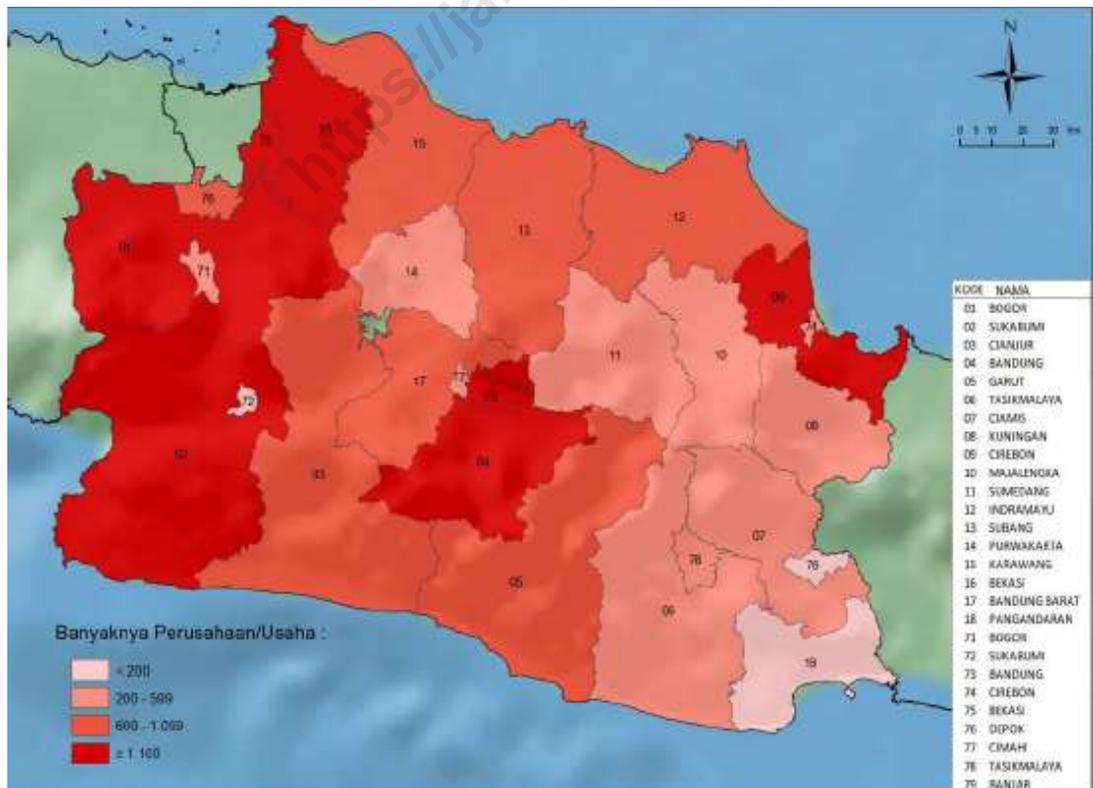
### III.6 SEBARAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI DI JAWA BARAT

Dapat dilihat pada (Gambar 1) bahwa sebaran perusahaan konstruksi di Jawa Barat bagian barat lebih tinggi dibandingkan di Jawa Barat bagian tengah ataupun timur. Hal ini disebabkan karena di Jawa Barat bagian barat banyak terdapat Kabupaten/Kota yang sedang gencar melakukan banyak pembangunan di Tahun 2017, sebagai contoh

pembangunan Meikarta dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di sekitar Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Sebaran perusahaan konstruksi di Jawa Barat bagian tengah di dominasi oleh Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dengan jumlah perusahaan konstruksi sebanyak 4.084 perusahaan konstruksi, sebagaimana kita tahu bahwa Kota Bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat sehingga intensitas kebijakan pembangunan baik gedung, tata kota, lingkungan, dan sipil cukup tinggi. Sedangkan di Jawa Barat bagian timur sebaran perusahaan konstruksi tertinggi di dominasi oleh Kabupaten Cirebon dengan jumlah perusahaan konstruksi sebanyak 2.914 perusahaan. (dapat dilihat di Tabel 15)

**Gambar 2. Banyaknya Perusahaan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, 2017**



**Tabel 1****Banyaknya Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Perkotaan	Desa
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Kabupaten</b>			
01. Bogor	40	292	143
02. Sukabumi	47	120	266
03. Cianjur	32	73	287
04. Bandung	31	211	69
05. Garut	42	162	280
06. Tasikmalaya	39	76	275
07. Ciamis	27	65	200
08. Kuningan	32	123	253
09. Cirebon	40	312	112
10. Majalengka	26	123	220
11. Sumedang	26	77	206
12. Indramayu	31	110	207
13. Subang	30	53	200
14. Purwakarta	17	73	119
15. Karawang	30	126	183
16. Bekasi	23	101	86
17. Bandung Barat	16	81	84
18. Pangandaran	10	12	81
<b>Kota</b>			
19. Bogor	6	68	0
20. Sukabumi	7	33	0
21. Bandung	30	151	0
22. Cirebon	5	22	0
23. Bekasi	12	56	0
24. Depok	11	63	0
25. Cimahi	3	15	0
26. Tasikmalaya	10	61	8
27. Banjar	4	13	12
<b>Jawa Barat</b>	<b>627</b>	<b>2 672</b>	<b>3 291</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 2****Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas /Area (km2)</b>	<b>Penduduk (orang)</b>	<b>Kepadatan Penduduk (orang/km2)</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Kabupaten</b>			
01. Bogor	2 710,62	5 715 009	2 108
02. Sukabumi	4 145,70	2 453 498	592
03. Cianjur	3 840,16	2 256 589	588
04. Bandung	1 767,96	3 657 601	2 069
05. Garut	3 074,07	2 588 839	842
06. Tasikmalaya	2 551,19	1 747 318	685
07. Ciamis	1 414,71	1 181 981	835
08. Kuningan	1 110,56	1 068 201	962
09. Cirebon	984,52	2 159 577	2 194
10. Majalengka	1 204,24	1 193 725	991
11. Sumedang	1 518,33	1 146 435	755
12. Indramayu	2 040,11	1 709 994	838
13. Subang	1 893,95	1 562 509	825
14. Purwakarta	825,74	943 337	1 142
15. Karawang	1 652,20	2 316 489	1 402
16. Bekasi	1 224,88	3 500 023	2 857
17. Bandung Barat	1 305,77	1 666 510	1 276
18. Pangandaran	1 010,00	395 098	391
<b>Kota</b>			
19. Bogor	118,50	1 081 009	9 122
20. Sukabumi	48,25	323 788	6 711
21. Bandung	167,67	2 497 938	14 898
22. Cirebon	37,36	313 325	8 387
23. Bekasi	206,61	2 859 630	13 841
24. Depok	200,29	2 254 513	11 256
25. Cimahi	39,27	601 099	15 307
26. Tasikmalaya	171,61	661 404	3 854
27. Banjar	113,49	182 388	1 607
<b>Jawa Barat</b>	<b>35 377,76</b>	<b>48 037 827</b>	<b>1 358</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 3**

**Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun (2010-2017 dan 2016-2017) dan Angkatan Kerja Tahun 2017 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Angkatan Kerja Tahun 2017	
	2010-2017	2016-2017	Bekerja	Pengangguran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Kabupaten</b>				
01. Bogor	2,51	2,28	2 351 753	248 368
02. Sukabumi	0,60	0,36	1 037 532	86 014
03. Cianjur	0,48	0,25	846 258	95 100
04. Bandung	1,94	1,70	1 584 391	64 673
05. Garut	0,99	0,75	1 044 137	89 111
06. Tasikmalaya	0,53	0,29	762 133	53 900
07. Ciamis	0,57	0,56	602 123	32 809
08. Kuningan	0,61	0,59	425 700	36 703
09. Cirebon	0,79	0,77	880 807	93 662
10. Majalengka	0,50	0,48	569 252	30 113
11. Sumedang	0,60	0,38	505 827	38 978
12. Indramayu	0,56	0,54	746 020	70 511
13. Subang	1,08	1,07	724 308	69 358
14. Purwakarta	1,38	1,14	392 747	39 370
15. Karawang	1,15	0,90	1 010 828	106 717
16. Bekasi	4,05	3,81	1 399 743	172 412
17. Bandung Barat	1,34	1,10	671 847	69 110
18. Pangandaran	0,58	0,58	235 561	8 141
<b>Kota</b>				
19. Bogor	1,77	1,53	448 386	47 438
20. Sukabumi	1,08	0,84	130 909	11 376
21. Bandung	0,54	0,29	1 116 529	102 869
22. Cirebon	0,96	0,91	142 246	14 568
23. Bekasi	2,84	2,60	1 266 692	130 254
24. Depok	3,67	3,43	1 009 401	76 025
25. Cimahi	1,43	1,19	272 017	25 033
26. Tasikmalaya	0,50	0,27	290 396	21 478
27. Banjar	0,50	0,27	84 032	5 337
<b>Jawa Barat</b>	<b>1,54</b>	<b>1,39</b>	<b>20 551 575</b>	<b>1 839 428</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 4**

**Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga  
di Jawa Barat Tahun 1990-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>Rata-Rata Anggota Rumah Tangga</b>
[1]	[2]	[3]
1990	6 938 222	4,2
2000	9 805 064	3,6
2010	11 573 793	3,7
2015	12 415 357	3,8
2016	12 589 790	3,76
2017	12 761 171	3,76

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 5**

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
dan Konstan menurut Kabupaten/Kota  
(Termasuk Minyak dan Gas Bumi)  
2017\*\*)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Adh Berlaku (Juta Rp)</b>	<b>Adh Konstan (Juta Rp)</b>
[1]	[2]	[3]
<b>Kabupaten</b>		
01. Bogor	201 386 682	139 951 954
02. Sukabumi	55 255 900	41 362 000
03. Cianjur	38 550 122	28 524 430
04. Bandung	103 362 819	73 051 179
05. Garut	47 992 858	35 456 648
06. Tasikmalaya	30 522 293	22 063 290
07. Ciamis	26 544 477	19 826 747
08. Kuningan	20 447 238	14 866 619
09. Cirebon	41 947 728	30 620 899
10. Majalengka	25 419 285	18 789 487
11. Sumedang	29 638 763	21 276 696
12. Indramayu	69 824 006	57 527 210
13. Subang	34 167 001	26 250 800
14. Purwakarta	58 522 233	42 229 370
15. Karawang	197 057 313	148 885 309
16. Bekasi	282 468 809	228 725 920
17. Bandung Barat	40 222 497	28 330 025
18. Pangandaran	9 400 880	6 939 636
<b>Kota</b>		
19. Bogor	38 506 474	28 655 000
20. Sukabumi	10 555 670	7 780 423
21. Bandung	240 109 627	172 851 961
22. Cirebon	19 739 683	14 877 095
23. Bekasi	83 327 644	62 202 010
24. Depok	58 344 495	42 939 379
25. Cimahi	26 533 619	19 893 710
26. Tasikmalaya	18 317 987	14 027 800
27. Banjar	3 908 897	2 920 404
<b>Jawa Barat</b>	<b>1 786 092 380</b>	<b>1 342 953 380</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

Catatan : \*\*) Angka Sangat Sementara

Tabel 6

**PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku, Kontribusi  
dan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan  
Menurut Kabupaten/Kota (Termasuk Minyak dan Gas Bumi)  
2017\*\*)**

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita Adh Harga Berlaku (Rupiah)	Kontribusi PDRB (Persen)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Kabupaten</b>			
01. Bogor	35 240 000	11,11	5,96
02. Sukabumi	22 530 000	3,06	5,14
03. Cianjur	17 080 000	2,13	5,72
04. Bandung	28 260 000	5,67	6,17
05. Garut	18 540 000	2,66	4,89
06. Tasikmalaya	17 470 000	1,68	5,95
07. Ciamis	22 460 000	1,47	5,21
08. Kuningan	19 140 000	1,11	6,36
09. Cirebon	19 420 000	2,33	5,05
10. Majalengka	21 290 000	1,39	6,81
11. Sumedang	25 850 000	1,62	6,23
12. Indramayu	41 740 000	3,98	1,45
13. Subang	21 860 000	1,89	5,10
14. Purwakarta	62 040 000	3,27	5,12
15. Karawang	85 070 000	10,94	5,76
16. Bekasi	80 700 000	15,72	5,78
17. Bandung Barat	24 140 000	2,22	5,21
18. Pangandaran	23 790 000	0,52	5,10
<b>Kota</b>			
19. Bogor	35 620 000	2,12	6,12
20. Sukabumi	32 600 000	0,58	5,43
21. Bandung	96 120 000	13,00	7,21
22. Cirebon	63 000 000	1,09	5,79
23. Bekasi	29 140 000	4,61	5,73
24. Depok	25 870 000	3,16	6,65
25. Cimahi	44 140 000	1,47	5,36
26. Tasikmalaya	27 700 000	0,99	6,07
27. Banjar	21 430 000	0,22	5,12
<b>Jawa Barat</b>	<b>37 180 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5,29</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

Catatan : \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 7**

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat  
Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Kategori 2015 – 2017 (Miliar Rupiah)**

Kelompok Sektor-Sektor	2015	2016*)	2017**)
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	132 497,85	146 816,71	153 693,12
2. Pertambangan dan Penggalian	26 025,12	25 347,02	25 481,69
3. Industri Pengolahan	656 824,39	703 516,39	755 387,26
4. Pengadaan Listrik dan Gas	11 437,57	11 920,09	10 855,23
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	1 160,27	1 343,14	1 588,06
6. Konstruksi	125 923,14	134 113,40	147 554,69
7. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Speda Motor	231 627,98	249 218,10	269 777,76
8. Transportasi dan Pergudangan	84 070,88	94 845,28	103 491,29
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38 098,82	43 014,05	48 395,13
10. Informasi dan Komunikasi	39 712,00	45 461,35	51 845,07
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	39 811,24	46 100,57	50 121,39
12. Real Estate	15 578,02	16 813,55	18 659,37
13. Jasa Perusahaan	6 076,87	6 645,61	7 339,11
14. Administrasi Pemerintahan,	36 673,94	38 653,63	40 220,23
15. Pertahanan dan Jamsos Wajib Administrasi Pemerintahan,	40 563,28	44 676,51	51 393,98
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10 614,56	12 064,60	13 472,97
17. Jasa Lainnya	28 278,90	32 207,82	36 816,02
<b>PDRB</b>	<b>1 524 974,83</b>	<b>1 652 757,82</b>	<b>1 786 092,38</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

Catatan : \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 8**

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat  
Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Kategori 2015 – 2017 (Miliar Rupiah)**

<b>Kelompok Sektor-Sektor</b>	<b>2015</b>	<b>2016*)</b>	<b>2017**)</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	92 802,80	98 033,19	99 874,97
2. Pertambangan dan Penggalian	27 403,82	27 138,68	26 589,93
3. Industri Pengolahan	524 466,68	549 471,38	578 858,48
4. Pengadaan Listrik dan Gas	5 939,65	6 139,55	5 438,11
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	948,98	1 009,02	1 080,96
6. Konstruksi	98 555,25	103 507,07	111 001,03
7. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Speda Motor	190 440,11	198 844,83	207 945,89
8. Transportasi dan Pergudangan	56 320,03	61 297,38	64 258,58
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29 776,55	32 559,35	35 285,42
10. Informasi dan Komunikasi	41 878,75	47 856,80	53 527,16
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	29 521,63	33 030,52	34 179,94
12. Real Estate	13 837,69	14 738,07	16 109,92
13. Jasa Perusahaan	4 932,61	5 334,98	5 784,33
14. Administrasi Pemerintahan,	24 987,38	25 731,42	25 780,58
15. Pertahanan dan Jamsos Wajib Administrasi Pemerintahan,	32 418,87	34 885,81	37 909,72
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan	8 880,76	9 723,04	10 537,79
17. Jasa Lainnya	24 120,77	26 226,54	28 790,56
<b>PDRB</b>	<b>1 207 232,34</b>	<b>1 275 527,64</b>	<b>1 342 953,38</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

Catatan : \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 9**

**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Kategori 2015 – 2017 (Persen)**

Kelompok Sektor-Sektor	2015	2016*)	2017**)
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	8.69	8,88	8,60
2. Pertambangan dan Penggalan	1.71	1,53	1,43
3. Industri Pengolahan	43.03	42,57	42,29
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.75	0,72	0,61
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.08	0,08	0,09
6. Konstruksi	8.26	8,11	8,26
7. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Speda Motor	15.24	15,08	15,10
8. Transportasi dan Pergudangan	5.50	5,74	5,79
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.50	2,60	2,71
10. Informasi dan Komunikasi	2.60	2,75	2,90
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.61	2,79	2,81
12. Real Estate	1.02	1,02	1,04
13. Jasa Perusahaan	0.40	0,40	0,41
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	2.41	2,34	2,25
15. Jasa Pendidikan	2.66	2,70	2,88
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.70	0,73	0,75
17. Jasa Lainnya	1.85	1,95	2,06
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

Catatan : \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 10**

**Laju PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Kategori 2015 – 2017 (Persen)**

<b>Kelompok Sektor-Sektor</b>	<b>2015</b>	<b>2016*)</b>	<b>2017**)</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0,16	5,64	1,88
2. Pertambangan dan Penggalian	0,41	(0,97)	(2,02)
3. Industri Pengolahan	4,39	4,77	5,35
4. Pengadaan Listrik dan Gas	(6,80)	3,37	(11,42)
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5,88	6,33	7,13
6. Konstruksi	6,43	5,02	7,24
7. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Speda Motor	3,71	4,41	4,58
8. Transportasi dan Pergudangan	9,19	8,84	4,83
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,10	9,35	8,37
10. Informasi dan Komunikasi	16,31	14,27	11,85
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,36	11,89	3,48
12. Real Estate	5,46	6,51	9,31
13. Jasa Perusahaan	8,15	8,16	8,42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	5,53	2,98	0,19
15. Jasa Pendidikan	10,17	7,61	8,67
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	14,14	9,48	8,67
17. Jasa Lainnya	8,96	8,73	9,78
<b>PDRB</b>	<b>10,03</b>	<b>5,66</b>	<b>5,29</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

Catatan : \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 11****Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk Dan PDRB per Kapita Menurut Kategori 2015 – 2017 (Persen)**

<b>Kelompok Sektor-Sektor</b>	<b>2015</b>	<b>2016*)</b>	<b>2017**)</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>1. Nilai Absolut</b>			
a. PDRB adh Berlaku (Miliar Rupiah)	1 524 974.83	1 652 757.82	1 786 092.38
b. PDRB adh Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	1 207 232.34	1 275 527.64	1 342 953.38
c. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	46 709 569	47 379 389	48 037 827
d. PDRB per kapita adh Berlaku (Rupiah)	32 648 017.58	34 883 476.86	37 180 956.99
e. PDRB per kapita adh Konstan (Rupiah)	25 845 503.73	26 921 572.16	27 956 164.21
<b>2. Indeks Perkembangan (2010 = 100)</b>			
a. PDRB atas dasar harga Konstan 2010	133.13	140.68	148.12
b. Indeks Harga Implisit	126.32	129.57	133.00

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017

Catatan : \*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 12**

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
dan Konstan Sektor Konstruksi menurut Kabupaten/Kota  
2017\*\*)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Adh Berlaku (Juta Rp)</b>	<b>Adh Konstan (Juta Rp)</b>
[1]	[2]	[3]
<b>Kabupaten</b>		
01. Bogor	19 540 090	13 104 720
02. Sukabumi	6 645 120	5 146 430
03. Cianjur	3 195 979	2 522 784
04. Bandung	6 289 850	4 912 750
05. Garut	2 891 903	2 258 649
06. Tasikmalaya	2 407 670	1 917 810
07. Ciamis	2 358 352	1 857 993
08. Kuningan	1 797 320	1 334 590
09. Cirebon	4 817 135	3 679 254
10. Majalengka	3 447 258	2 653 120
11. Sumedang	3 020 344	2 277 296
12. Indramayu	4 192 800	2 933 500
13. Subang	2 783 424	2 150 035
14. Purwakarta	4 269 828	2 991 075
15. Karawang	7 781 773	5 865 486
16. Bekasi	18 529 291	14 665 275
17. Bandung Barat	3 138 920	2 103 220
18. Pangandaran	800 970	633 461
<b>Kota</b>		
19. Bogor	4 409 400	3 237 680
20. Sukabumi	714 225	522 654
21. Bandung	21 275 805	15 238 956
22. Cirebon	2 009 191	1 512 987
23. Bekasi	9 166 850	7 073 070
24. Depok	11 266 200	8 745 120
25. Cimahi	3 331 031	2 601 749
26. Tasikmalaya	2 911 730	2 138 930
27. Banjar	389 858	293 069
<b>Jawa Barat</b>	<b>147 554 690</b>	<b>111 001 030</b>

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2017

Catatan : \*\*) Angka Sangat Sementara

Tabel 13

**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  
Sektor Konstruksi menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2017\*\*) (Dalam Persen)**

Kabupaten/Kota	2016	2017
[1]	[2]	[3]
<b>Kabupaten</b>		
01. Bogor	9,25	9,70
02. Sukabumi	4,26	13,44
03. Cianjur	2,10	8,29
04. Bandung	3,96	6,09
05. Garut	1,91	6,03
06. Tasikmalaya	1,58	7,89
07. Ciamis	1,56	8,88
08. Kuningan	1,17	8,79
09. Cirebon	3,27	11,48
10. Majalengka	2,02	13,56
11. Sumedang	1,98	10,19
12. Indramayu	2,71	6,00
13. Subang	1,85	8,15
14. Purwakarta	2,85	7,30
15. Karawang	5,14	3,95
16. Bekasi	12,39	6,56
17. Bandung Barat	2,07	7,80
18. Pangandaran	0,53	8,52
<b>Kota</b>		
19. Bogor	2,87	11,45
20. Sukabumi	0,47	6,77
21. Bandung	14,00	8,86
22. Cirebon	1,37	10,18
23. Bekasi	6,00	11,00
24. Depok	7,20	19,31
25. Cimahi	2,19	12,55
26. Tasikmalaya	1,89	15,90
27. Banjar	0,25	8,26
<b>Jawa Barat</b>	<b>8,11</b>	<b>8,26</b>

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017

Catatan : \*\*) Angka Sangat Sementara

Tabel 14

**Banyaknya Perusahaan/Usaha Konstruksi menurut Badan Usaha  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	PT/PT Persero	CV	Firma	Koperasi	Tidak Berbadan Usaha	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>Kabupaten</b>						
01. Bogor	274	93	-	-	806	1 173
02. Sukabumi	43	109	-	-	1 083	1 235
03. Cianjur	37	213	-	1	651	902
04. Bandung	111	107	-	1	1 947	2 166
05. Garut	52	146	-	-	627	825
06. Tasikmalaya	24	34	-	-	280	338
07. Ciamis	32	91	-	-	199	322
08. Kuningan	22	114	1	-	139	276
09. Cirebon	85	69	-	-	2760	2914
10. Majalengka	28	132	-	-	427	587
11. Sumedang	30	211	-	-	232	473
12. Indramayu	97	93	-	-	625	815
13. Subang	47	149	-	-	483	679
14. Purwakarta	59	45	-	-	313	417
15. Karawang	111	122	-	-	639	872
16. Bekasi	382	104	-	-	682	1 168
17. Bandung Brt	42	41	-	-	525	608
18. Pangandaran	16	57	-	-	59	132
<b>Kota</b>						
19. Bogor	121	62	-	1	144	328
20. Sukabumi	24	45	-	-	114	183
21. Bandung	661	192	-	1	1 064	1 918
22. Cirebon	87	54	-	-	81	222
23. Bekasi	694	104	1	-	784	1 583
24. Depok	115	79	-	-	612	806
25. Cimahi	26	35	-	-	146	207
26. Tasikmalaya	36	59	-	-	129	224
27. Banjar	15	42	-	-	29	86
<b>Jawa Barat</b>	<b>3 271</b>	<b>2 602</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15 580</b>	<b>21 459</b>

Sumber : Direktori Perusahaan Konstruksi Sensus Ekonomi 2016

**Tabel 15**

**Banyaknya Perusahaan/Usaha Konstruksi Menurut Skala Usaha  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>	<b>Besar</b>	<b>Jumlah</b>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>Kabupaten</b>					
01. Bogor	808	102	258	5	1 173
02. Sukabumi	1 083	113	39	-	1 235
03. Cianjur	651	214	37	-	902
04. Bandung	1 947	120	95	4	2 166
05. Garut	629	145	49	2	825
06. Tasikmalaya	280	35	23	-	338
07. Ciamis	199	91	31	1	322
08. Kuningan	139	117	20	-	276
09. Cirebon	2 760	81	72	1	2 914
10. Majalengka	427	134	24	2	587
11. Sumedang	232	211	28	2	473
12. Indramayu	625	101	88	1	815
13. Subang	483	151	44	1	679
14. Purwakarta	313	49	52	3	417
15. Karawang	640	129	100	3	872
16. Bekasi	682	136	333	17	1 168
17. Bandung Brt	525	42	41	-	608
18. Pangandaran	59	57	15	1	132
<b>Kota</b>					
19. Bogor	145	66	117	-	328
20. Sukabumi	114	47	19	3	183
21. Bandung	1 064	244	582	28	1 918
22. Cirebon	81	60	77	4	222
23. Bekasi	784	148	639	12	1 583
24. Depok	612	95	99	-	806
25. Cimahi	146	39	22	-	207
26. Tasikmalaya	129	59	36	-	224
27. Banjar	29	42	14	1	86
<b>Jawa Barat</b>	<b>15 586</b>	<b>2 828</b>	<b>2 954</b>	<b>91</b>	<b>21 459</b>

Sumber : Direktori Perusahaan Konstruksi Sensus Ekonomi 2016

**Tabel 16****Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan  
di Jawa Barat Tahun 2012 – 2016**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan :	Juta Rupiah	50 400 626	58 053 300	66 130 561	94 488 923	106 340 848
Gedung	Juta Rupiah	12 672 000	14 609 295	16 653 462	23 807 769	26 026 843
Bangunan Sipil	Juta Rupiah	31 845 919	35 076 395	38 560 686	53 529 651	61 985 547
Khusus	Juta Rupiah	5 882 707	8 367 610	10 916 413	17 151 504	18 328 458

Sumber : Statistik Konstruksi 2016, BPS

Catatan : \*) Angka Sementara

**Tabel 17****Jumlah Pekerja di Perusahaan Konstruksi Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2012 – 2016**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pekerja Tetap	Orang	71 599	75 449	74 658	77 135	79 023
Pekerja Harian Lepas	Hari Orang	111 955 569	116 353 122	145 402 725	175 432 000	193 477 000
Balas Jasa Pekerja	Juta Rupiah	7 317 803	8 251 478	9 409 530	15 922 369	17 988 275
Jumlah Perusahaan	Unit	9 602	9 892	9 551	9 774	10 560

Sumber : Statistik Konstruksi 2016, BPS

Catatan : \*) Angka Sementara

**Tabel 18****Nilai Output, Biaya Antara Perusahaan Konstruksi  
Tahun 2014 - 2016**

Uraian	Satuan	2014	2015	2016*)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Nilai Output	Juta rupiah	79 094 659	104 008 573	117 034 748
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan	Juta rupiah	66 130 561	94 488 923	106 340 848
Nilai Pendapatan dari Kegiatan lain	Juta rupiah	8 345 400	9 519 650	10 693 900
Biaya Antara/Input	Juta rupiah	60 128 757	68 181 059	76 925 361
Nilai Bahan Bangunan yang dipakai	Juta rupiah	33 161 581	38 340 027	44 199 983
Pemakaian Bahan Bakar dan Listrik	Juta rupiah	745 730	792 240	848 240
Biaya bahan dan jasa lainnya	Juta rupiah	26 221 446	29 048 792	31 878 138

Sumber : Statistik Konstruksi 2016, BPS

Catatan : \*) Angka Sementara

**Tabel 19****Indeks Prospek Bisnis, Indeks Kondisi Bisnis dan Indeks Umum  
Perusahaan Konstruksi Jawa Barat per Triwulan 2015 – 2018**

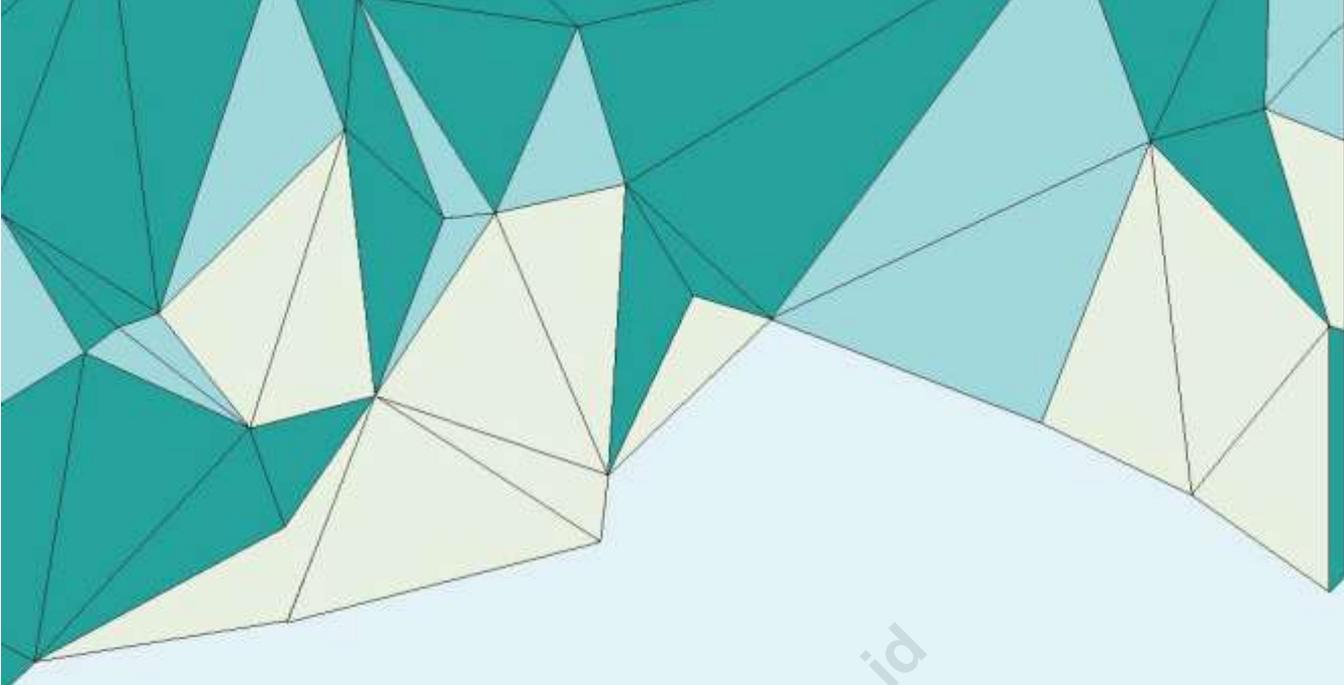
Tahun dan Triwulan		Indeks Prospek Bisnis	Indeks Kondisi Bisnis	Indeks Umum
[1]		[2]	[3]	[4]
2015	Triwulan I	60,86	52,64	30,59
	Triwulan II	58,89	51,76	29,00
	Triwulan III	59,61	53,37	28,56
	Triwulan IV	61,15	63,69	20,18
2016	Triwulan I	61,15	53,03	31,45
	Triwulan II	50,00	52,23	24,15
	Triwulan III	59,87	55,92	16,25
	Triwulan IV	55,25	47,00	24,26
2017	Triwulan I	59,35	53,60	27,35
	Triwulan II	56,25	60,16	20,45
	Triwulan III	58,64	49,26	25,56
	Triwulan IV	61,25	60,63	22,99
2018	Triwulan I	60,64	55,42	21,25

Sumber : Indikator Konstruksi Triwulan I 2018, BPS

**Tabel 20****Pertumbuhan Pekerja Tetap, Pekerja Harian, Balas Jasa Jasa dan Nilai Konstruksi Jawa Barat per Triwulan Tahun 2015 - 2018**

Tahun dan Triwulan	Pekerja Tetap	Pekerja Harian	Balas Jasa	Nilai Konstruksi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2015 Triwulan I	-2,57	-1,27	-2,28	-3,81
Triwulan II	0,36	5,01	4,36	7,80
Triwulan III	1,33	4,62	5,11	4,81
Triwulan IV	0,00	6,30	6,37	6,58
2016 Triwulan I	-0,56	-2,75	-1,74	-1,09
Triwulan II	1,82	3,20	3,34	3,18
Triwulan III	1,28	2,24	2,14	2,28
Triwulan IV	0,92	4,70	4,55	4,93
2017 Triwulan I	-0,81	-2,00	-1,72	-1,85
Triwulan II	1,74	5,36	6,00	5,87
Triwulan III	1,99	5,86	5,40	5,76
Triwulan IV	1,80	2,54	3,40	3,21
2018 Triwulan I	-1,04	-2,65	-1,36	-1,78

Sumber : Indikator Konstruksi Triwulan I 2018, BPS



**DATA**  
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

JL. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat  
Telp: 022 7272595; 022 7201696; Faks: 022 7213572  
E-Mail : [bps3200@bps.go.id](mailto:bps3200@bps.go.id)  
Website : <http://jabar.bps.go.id>